

**PENENTUAN SEKTOR EKONOMI PRIORITAS  
GUNA PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN  
PEMALANG PADA TAHUN 1997-2003**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh :

**Maya Ridaningsih**  
NIM. 010810101183

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 338.95982
Terima gt :		RIS
Induk :		P
Pengkatalog :		

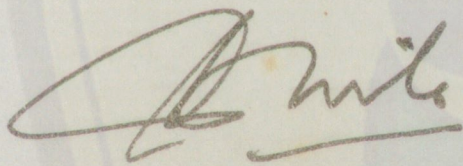
e.17

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI  
2005**

## TANDA PERSETUJUAN

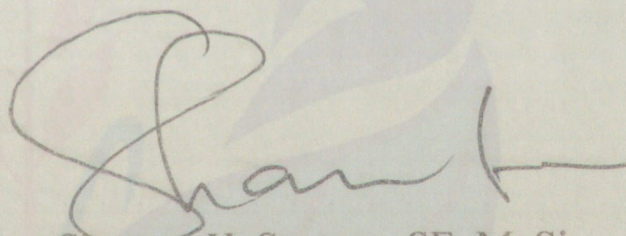
Judul Skripsi : Penentuan Sektor Ekonomi Prioritas Guna Pembangunan Wilayah  
Kabupaten Pemasang Pada Tahun 1997-2003  
Nama Mahasiswa : Maya Ridaningsih  
NIM : 010810101183  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Pengembangan Regional  
Tanggal Persetujuan : 15 September 2005

Pembimbing I



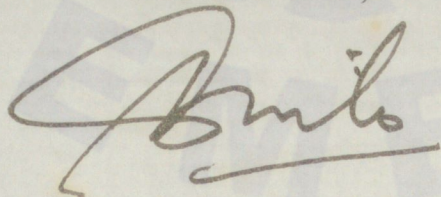
Drs. J. Sugiarto, SU  
NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Siswoyo H. Santoso, SE, M. Si  
NIP. 132 056 182

Mengetahui;  
Ketua Jurusan,



Drs. J. Sugiarto, SU  
NIP. 130 610 494

## JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN SEKTOR EKONOMI PRIORITAS GUNA PEMBANGUNAN

WILAYAH KABUPATEN PEMALANG PADA TAHUN 1997-2003

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : M A Y A R I D A N I N G S I H

N. I. M. : 010810101183

J u r u s a n : I L M U E K O N O M I D A N S T U D I P E M B A N G U N A N

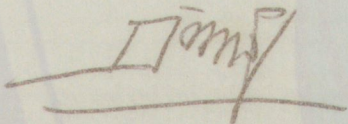
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

1 OKTOBER 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

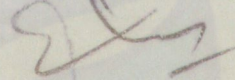
Ketua,



Prof. Drs. H. Kadiman, SU

NIP. 130 261 684

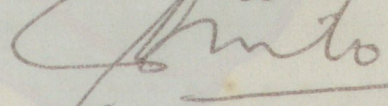
Sekretaris,



Drs. P. Edi Suswandi, MP

NIP. 131 472 792

Anggota,



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



Dr. Sarwedi, MM

NIP. 131 276 658



## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

- *Dienul Islam sebagai pedoman hidupku*
- *Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, Bapakku Kasmuri dan Mamahku Ning Aries Nurohmah terimakasih atas doa, kasih sayang dan semangat yang telah diberikan selama ini.*
- *Ketiga orang adikku yang aku sayangi, Dinar Riska, Riska Riski dan Regi Wijaya. Kalian selalu membuatku tersenyum.*
- *Qowwamku, Orderto Farma Samboga terimakasih atas doa, bimbingan dan cintanya.*
- *Alma Materku yang kubanggakan*

## MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. (QS. Al Lam Nasyrah: 6-7)*

*Al-Quran adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 138)*

*Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan maka Allah SWT akan memudahkan kepadanya di dunia maupun di akhirat.*

*(HR, Ibnu Majah)*

*Abadikan nikmat dengan bersyukur*

*Abadikan ketaatan dengan berlemah lembut*

*Abadikan kekuasaan dan kemenangan dengan bersikap tawadhu*

*Serta cinta kepada sesama manusia. (Umar bin Khatab)*

*Dunia hanya berjalan tiga hari, yaitu hari kemarin yang kita tak berpengharapan apa-apa lagi, pada hari ini yang harus kita peroleh kebaikan dan kesuksesan, dan hari esok yang tidak kita ketahui apakah kita termasuk yang masih hidup atau sudah meninggal.*

*(Hasan Al Basri)*

## ABSTRACT

This research aim to know economic sectors which exist to be chosen become the priority in Kabupaten Pematang and to know friction of total development in economic sector in Kabupaten Pematang 1997-2003. This research location is in region Pematang based in consideration that region of Pematang is a potential region toward economic development of middle java.

Analysis that used in this research was Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), then to know the exist sector that deserve to be put in the priority. The writer used Scalling analysis by rank scor of LQ and DLQ with assumption that the sector in first rank are potential sector, then to know economic sector friction writer used Coeficient Reshuffle analysis (CR).

From total of scalling result that had been ranked we will find out potential economic sectors. Potential economic sectors that deserved to be priority which in the first rank are financial, rent and service sector, in second rank are agriculture, in third rank service sector, in fourth rank electric and water drinking sectors, fifth rank is trading sector, in sixth rank sector are mining and dig sector, in seventh rank is building and construction sector, eighth rank are transportation and communication sector, and in ninth rank is industrial sector.

From the result of calculation on Coeficient Reshuffle is got seven economic sector that have friction which strength in the future that are industrial sector, services sector, transportation and communication sector, trading sector, mining and dig sector, electric and water drinking sector, building and construction sector.

(Keyword : Priority Economic Sector and Development of Region)

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang layak di dipilih menjadi sektor prioritas di Kabupaten Pematang dan untuk mengetahui pergeseran total pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Pematang berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Pematang merupakan daerah yang berpotensi terhadap perkembangan ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), kemudian untuk mengetahui sektor yang layak diprioritaskan maka digunakan analisis *Skalling* dengan cara meranking nilai LQ dan DLQ dengan asumsi bahwa sektor yang berada pada peringkat pertama adalah sektor yang layak diprioritaskan, kemudian untuk mengetahui pergeseran sektor ekonomi digunakan analisis *Coeficient Reshuffle* (CR).

Dari total nilai *Skalling* yang sudah diranking maka akan dihasilkan sektor ekonomi yang layak diprioritaskan. Sektor ekonomi yang layak diprioritaskan yang berada pada peringkat pertama adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, pada peringkat kedua sektor pertanian, pada peringkat ketiga sektor jasa-jasa, pada peringkat keempat sektor listrik dan air minum, pada peringkat kelima sektor perdagangan, pada peringkat keenam sektor penggalian dan pertambangan, pada peringkat ketujuh sektor bangunan, pada peringkat kedelapan sektor pengangkutan dan komunikasi, dan pada peringkat kesembilan adalah sektor industri pengolahan.

Dari perhitungan *Coeficient Reshuffle* dihasilkan tujuh sektor ekonomi yang memiliki pergeseran yang menguat di masa yang akan datang yaitu sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik dan air minum, sektor bangunan.

(Kata Kunci : Sektor Ekonomi Prioritas dan Pembangunan Wilayah)

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Sektor Ekonomi Prioritas Guna Pembangunan Wilayah Kabupaten Pematang Pada Tahun 1997-2003”** dengan lancar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. J. Sugiarto, SU dan Siswoyo Hari Santoso, SE, Msi sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memeberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Prof. Drs. H. Kadiman, SU sebagai ketua penguji dan Drs. P. Edi Suswandi, MP sebagai sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan petunjuk kepada penulis.
3. Drs. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi, pembantu dekan beserta staf dan segenap dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membantu dan mentransfer ilmunya kepada penulis.
4. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan tuntunan kepada penulis.
5. Dra. Aminah, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data statistik mengenai Propinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data statistik mengenai Kabupaten Pematang.
8. Keluarga Pematang, bapakku Kasmuri dan mamahku Ning Aries Nurohmah, adik-adikku tersayang, Dinar Riska, Riska Riski dan Regi Wijaya yang telah memberikan



dukungan materi, memotivasi dalam menyelesaikan skripsi, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

9. Qowwamku, Orderto Farma Samboga yang selalu mendoakanku, dengan kesabarannya mendengarkan keluh kesahku, membimbingku serta selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku.
10. Keluarga Purworejo yang selalu menyambutku dengan keramahannya, insyaAlloh untuk selamanya.
11. Beliau-beliauku yang telah mentransfer ilmunya dan selalu membimbingku agar tetap dekat dengan-Nya, serta teman-temanku dikelompok "FIVE".
12. Keluarga besar Firdausi, Salsabila, dan Ruhul Jadid yang telah menemaniku selama di Jember.
13. Teman-teman Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2001, teman-teman kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HMJ IESP) periode 2003-2004, Ikhwah fillah di BASTILING dan FE UNS yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman yang Woow... Subhanaalloh ☺
14. Semua pihak yang telah membantu.

Semoga bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Alloh SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan semoga bermanfaat.

Jember, Oktober 2005

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
2.1 Latar Belakang Masalah .....	1
2.2 Perumusan Masalah.....	4
2.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	8
2.2.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah.....	9
2.2.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah.....	9
2.2.3.1 Teori Ekonomi Neo Klasik.....	10
2.2.3.2 Teori Basis Ekonomi (Economic Base).....	10
2.2.3.3 Teori Kutub Pertumbuhan (Growthpole).....	11

2.2.3.4 Teori Lokasi.....	13
2.2.3.5 Keunggulan Komparatif.....	14
2.2.3.6 Teori Tempat Sentral (Central Place Theory).....	14
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2.4.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2.4.2 Jenis-jenis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2.4.3 Manfaat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16
2.2.4.4 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16
2.2.5 Metode Analisis Location Quotient (LQ).....	18
2.2.6 Metode Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ).....	20
2.2.7 Analisis Skalling.....	21
2.2.8 Analisis Coeficient Reshuffle (CR).....	22

### III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.3.2 Unit Analisis.....	24
3.3.3 Populasi.....	24
3.3.4 Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Metode Analisis Data.....	25
3.3.1 Analisis Sektor Ekonomi Prioritas.....	25
3.3.1.1 Analisis Location Quotient (LQ).....	25
3.3.1.2 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) .....	26
3.3.1.3 Analisis Skalling.....	28
3.3.2 Analisis Coeficient Reshuffle (CR).....	28
3.4 Definisi Variabel Operasional.....	29

### IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	31
4.1.1 Keadaan dan Kondisi Geografis Kabupaten Pematang.....	31

4.1.2 Keadaan Penduduk di Kabupaten Pemasang.....	32
4.1.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
4.1.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Pemasang.....	37
4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemasang.....	39
4.2 Analisis.....	41
5.1 Analisis Sektor Ekonomi Prioritas.....	41
4.2.1.1 Analisis Location Quotient.....	42
4.2.1.2 Analisis Dynamic Location Quotient.....	43
4.2.1.3 Analisis Skalling.....	45
5.2 Analisis Coeficient Reshuffle.....	47
4.3 Pembahasan.....	48
<b>V SIMPULAN SERTA SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Rumah Tangga, Banyaknya Penduduk, Dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Pemalang Dirinci Per Kecamatan Tahun 2003.....	33
Tabel 2	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Pemalang Dirinci Per Kecamatan Tahun 2003 .....	34
Tabel 3	Jumlah Penduduk (Usia 5 Tahun Ke Atas) Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2003.....	34
Tabel 4	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pemalang Menurut Kelompok Umur Tahun 2003.....	36
Tabel 5	Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pemalang Tahun 2003.....	36
Tabel 6	Distribusi PDRB Menurut Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993.....	37
Tabel 7	Struktur Perekonomian Di Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993.....	39
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993.....	41
Tabel 9	Skalling Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 .....	42
Tabel 10	Skalling Dynamic Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003.....	44
Tabel 11	Total Skalling Berdasarkan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003.....	46
Tabel 12	Skalling Coeficient Reshuffle Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 .....	47

Lampiran 13 Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang.....	60
Lampiran 14 Perhitungan Coeficient Reshuffle (CR) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang .....	60
Lampiran 15 Skalling Location Quotient (LQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003.....	60
Lampiran 16 Skalling Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang.....	61
Lampiran 17 Total Skalling Berdasarkan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang Menurut Lapangan Usaha.....	61
Lampiran 18 Skalling Coeficient Reshuffle (CR) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang .....	62

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya-upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan pertimbangan sektoral dan pertimbangan regional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita dan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi pembangunan ekonomi itu harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang saling menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Keadaan yang umum dijumpai pada negara-negara sedang berkembang adalah adanya ketimpangan pertumbuhan sektoral dan kurang meratanya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya adalah wilayah Indonesia yang menggambarkan adanya keanekaragaman potensi baik Sumber Daya Alam, budaya, iklim, ekonomi, maupun sumberdaya dari masing-masing daerah yang menyebabkan terjadinya tingkat pertumbuhan yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dengan melihat potensi-potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing daerah tersebut (Nuryasman, 1996; 235).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; 298).

Sejalan dengan otonomi daerah, maka daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah, dan pemanfaatan secara optimal potensi wilayah. Oleh karena itu daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat untuk memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan bisa berkesinambungan. Daerah harus lebih mampu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar, karena penerimaan daerah yang dilimpahkan dari pusat sudah terbatas.

Setelah Otonomi Daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang di prioritaskan pengembangannya. Kemampuan daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting, hal ini terkait dengan kewajibannya di satu sisi sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

Pemilihan secara tepat terhadap sektor-sektor yang berperan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan lebih dahulu disuatu daerah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Prioritas tersebut dapat ditentukan dengan melihat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya serta melihat sektor penghasil nilai ekspor yang besar. Hal ini berarti disamping pengembangan sektor tersebut juga dapat memberikan surplus neraca pembayaran sebesar-besarnya sehingga dapat dipergunakan untuk akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Program pembangunan Kabupaten Pematang Jaya yang tertera dalam Properda (Program Pembangunan Daerah) merupakan turunan dari cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, yaitu pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkepribadian luhur serta berkecukupan dalam materi.



Untuk mencapai tujuan pembangunan selaras dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Pematang diperlukan perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan melihat kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan dan mempertimbangkan aspek hubungan daerah. Demi mewujudkan pembangunan daerah yang merata keseluruh wilayah Indonesia maka pembangunan daerah harus dilakukan dengan melalui kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral yang diserasikan dengan potensi dan permasalahan daerah masing-masing. Pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang keadaan tiap daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1992; 122).

Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita. Oleh karena itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah itu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Pematang pada tahun 2003 mencapai Rp 3.521.921.713,00, Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Pematang pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 3.066.476.149,00. Jadi pada tahun 2003 ada pertumbuhan sebesar 14,85 %, sedangkan angka pertumbuhan harga berlaku tahun sebelumnya sebesar 12,17 % (BPS Kabupaten Pematang, 2002).

Angka pertumbuhan atas dasar harga berlaku sebesar 14,85 % masih mengandung faktor fluktuasi harga. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 1993 di Kabupaten Pematang pada tahun 1997 sebesar Rp1.050.964.647,00 dan pada tahun 1998 sebesar Rp 1.033.694.109,00 Jadi

mengalami penurunan sebesar 1,64 %. Hal ini terjadi karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian setelah pasca krisis yaitu pada tahun 1999, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Pematang dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan dan pada tahun 2003 ada peningkatan sebesar 3,77 %, yaitu dari Rp 1.164.528.252,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 1.208.417.677,00 di tahun 2003. Hal ini membuktikan adanya pertumbuhan yang cukup baik di Kabupaten Pematang.

## 1.2 Perumusan Masalah

Tujuan ilmu ekonomi regional dalam lingkup daerah adalah menciptakan full employment, adanya economic growth terciptanya stabilitas harga, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan dalam wilayah, penetapan sektor unggulan wilayah, membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan serta pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. (Tarigan, 2004; 4)

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumberdaya yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Pematang dan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka perencanaan pembangunan daerah dapat di susun menurut tinjauan antar sektor. Perencanaan sektoral menekankan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki keunggulan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Unsur penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pemahaman yang baik terhadap sektor-sektor unggulan daerah. Untuk keperluan di masa yang akan datang, maka dibutuhkan investigasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Sektor-sektor mana saja yang layak menjadi prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003?
2. Seberapabesar pergeseran total pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sektor-sektor yang layak di pilih menjadi sektor prioritas di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003.
2. Mengetahui pergeseran total pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Pematang, dengan diketahuinya sektor-sektor yang layak diprioritaskan dan adanya pergeseran total pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pematang maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam menentukan kebijaksanaannya agar lebih terarah.
2. Bagi calon peneliti yang akan meneliti tentang sektor ekonomi potensial, sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan sebelum meneliti tentang sektor yang sama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Yuwono (1999) menjelaskan bahwa dengan adanya Otonomi Daerah maka seharusnya setiap Daerah Tingkat II di Jawa Tengah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan Daerah Tingkat II yang lain. Keunggulan yang dimiliki suatu daerah dapat diketahui dengan menentukan sektor yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan daerah yang lain. Penelitian yang berjudul Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/99 dan UU 25/99 ini mengambil lokasi penelitian di Kotamadia Salatiga dengan tujuan untuk menentukan sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan alat analisa *Location Quationt (LQ) Dynamic Location Quationt (DLQ)* dan *analisa Shift Share* ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha adalah sektor unggulan yang dimiliki daerah Kotamadia Salatiga sekarang ini. Apabila dilihat dari nilai LQ statis pada tahun 1996 ada lima sektor yang unggul di Kotamadia Salatiga jika dibandingkan dengan Daerah Tingkat II yang lain di Jawa Tengah yaitu sektor listrik dan air bersih sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi sektor keuangan persewaan dan jasa usaha serta sektor jasa-jasa lain. Keunggulan ini disebabkan oleh faktor lokasional, dimana Kotamadia Salatiga merupakan kota tujuan pendidikan dan pariwisata. Kota ini memiliki beberapa Universitas sehingga menjadi tempat tujuan pendidikan, selain itu letaknya yang strategis di jalur lalu lintas juga menyebabkan Kotamadia Salatiga menjadi tempat persinggahan bagi pemakai jalan. Empat sektor yang lain tidak dapat diunggulkan terhadap Daerah Tingkat II yang lain di Jawa Tengah.

Syodatiningsih (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Penentuan Sektor Prioritas Dalam Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan alat analisa LQ, DLQ, Skalling, dan CR bertujuan untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang diprioritaskan dan untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang mempunyai kemampuan tertinggi menggeser struktur ekonomi di Kabupaten Lamongan tahun 1996-1999. Dalam

mengetahui sektor atau sub sektor yang mempunyai kemampuan tertinggi menggeser struktur ekonomi di Kabupaten Lamongan tahun 1996-1999. Dalam penelitiannya Syaodatiningsih menyimpulkan bahwa sektor ekonomi yang diprioritaskan di Kabupaten Lamongan secara berurutan adalah sektor pertanian dengan nilai skalling sebesar 100, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 83,48; sektor jasa sebesar 44,60 diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor angkutan dan komunikasi. Berdasarkan perhitungan CR, terdapat lima sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan menguat yaitu sektor pertanian dengan nilai CR sebesar 0,0274; sektor bangunan dengan nilai 0,0225; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai 0,0110; sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai 0,0073 dan sektor industri pengolahan dengan nilai 0,0049.

Penelitian Niswatun Khasanah (2002) yang berjudul Analisis Sektor Ekonomi Prioritas Guna Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 1994-1997 dengan menggunakan alat analisis LQ, DLQ, Skalling dan Shift share dengan tujuan untuk mengetahui sektor-sektor prioritas terpilih dan untuk mengetahui pergeseran total pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Gresik. Dalam penelitiannya diketahui bahwa terdapat empat sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Di Kabupaten Gresik, sembilan sektor yang mengalami pergeseran total secara berurutan adalah sektor pertanian 1,2273; sektor industri pengolahan 5,1998; sektor listrik, gas dan air bersih 1,6521; sektor konstruksi 1,6512; sektor perdagangan, hotel dan restoran 3,5924; sektor pengangkutan dan komunikasi 0,6236; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,2448; dan sektor jasa-jasa lainnya 0,2355.

Penelitian yang akan dilakukan kali ini mempunyai tujuan dan alat analisa yang sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaann dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. (Tarigan, 2004; 44). Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga ditentukan oleh terjadinya transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan out put perkapita dalam jangka panjang. Jadi persentase pertambahan out put itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat di kembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *Competitive Advantage* untuk di kembangkan, artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar.

Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara sektoral maupun perkapita (Aziz, 1994; 97).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah itu.

### 2.2.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; 108).

Pembangunan daerah jika dituangkan dalam bentuk model matematika merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan. (Arsyad, 1999: 115).

Konsep region yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi regional antara lain:

1. Konsep pertama yaitu *Homogeneous Region* yang mendefinisikan berdasarkan persamaan karakteristik beberapa daerah. Karakteristik yang dimaksud antara lain pendapatan per kapita, kepadatan penduduk, jenis produksi utama, problema sosial, tingkat industrialisasi dan lain-lain.
2. Konsep kedua yaitu *Nodal Region* yang lebih menekankan pada tingkat keterkaitan antara masing-masing daerah. Tingkat keterkaitan tersebut biasanya diukur berdasarkan arus lalu lintas barang, penduduk, maupun modal.
3. Konsep ketiga *Planning Region* pengelompokan didasarkan pada kesatuan politik atau kesatuan administrasi, seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

### 2.2.3 Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua

hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. (Arsyad, 1999: 114).

Berikut ini teori-teori atau konsep yang dijumpai dalam literatur ekonomi regional:

### **2.2.3.1 Teori Ekonomi Neo Klasik**

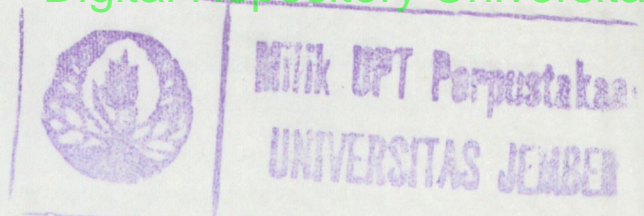
Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik berkembang sejak tahun 1956-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut Solow (1956) peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. (Arsyad, 1999: 62).

Peranan teori ekonomi neo klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis perekonomian daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 (dua) konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. (Arsyad, 1999: 116).

### **2.2.3.2 Teori Basis Ekonomi (Economic Base)**

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (Basic Activities) adalah kegiatan-kegiatan yang mengeksport barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan bukan basis (non





perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. (Perroux dalam Usman, 1964).

Pusat pertumbuhan (Growthpole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah itu dan masyarakat senang datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Pusat pertumbuhan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Jadi kehidupan kota akan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2. Ada efek multiplier

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kalilipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar sektor tersebut.

3. Adanya konsentrasi Geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut.

#### 4. Bersifat mendorong daerah belakangnya

Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Jadi konsentrasi kegiatan ekonomi dapat di anggap pusat pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (diantara berbagai sektor di dalam kota) maupun ke luar (ke daerah belakangnya). (Tarigan, 2004; 152).

#### 2.2.3.4 Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyediakan tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2004; 115).

Lokasi sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi antara lain adalah ketersediaan bahan baku, upah buruh, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar local dan aksesibilitas dari tempat produksi ke wilayah pemasaran yang dituju (terutama aksesibilitas pemasaran ke luar daerah tersebut).

Dari sudut ekonomi, lokasi yang dipilih adalah yang memiliki keunggulan komparatif untuk kegiatan yang ingin dilaksanakan. Artinya secara perbandingan maka lokasi itu adalah yang paling efisien dari sudut biaya dan mudah dalam pemasarannya.

Pada tingkat pemilihan lokasi, penetapan lokasi industri terkait dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengusaha dan sudut pandang pemerintah. Pengusaha melihat lokasi dari sudut keuntungan maksimal jangka panjang yang dapat diraih, tetapi pemerintah selain melihat bahwa perusahaan akan berkembang apabila memilih lokasi di daerah itu juga memperhatikan efisiensi pemakaian ruang, artinya untuk setiap lahan yang tersedia, di pilih kegiatan yang paling

cocok di daerah itu yang menjamin keserasian pemakaian lahan secara nasional akan memberikan nilai tambah yang optimal (Tarigan, 2004; 141).

### 2.2.3.5 Keunggulan Komparatif

Keunggulan Komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah.

Suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif karena salah satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor sebagai berikut (Tarigan, 2004; 88):

1. Pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya bahan tambang,
2. Masyarakat menguasai teknologi mutakhir untuk jenis produksi tertentu,
3. Masyarakat menguasai keterampilan khusus. Misalnya membuat ukiran,
4. Wilayah itu dekat dengan pasar,
5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi. Misalnya Singapura dengan lalu lintas yang ramai membuat angkutan barang atau penumpang bias lebih cepat, tepat waktu, dan murah karena banyak pilihan,
6. Daerah konsentrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis
7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan. Efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran,
8. Upah buruh yang rendah (relatif, sesuai dengan produktivitas) dan tersedia dalam jumlah cukup serta di dukung oleh ketrampilan yang memadai,
9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan,
10. Kebijakan pemerintah, menciptakan salah satu atau beberapa faktor-faktor yang menciptakan keunggulan dan atau dengan pemberian subsidi untuk sementara waktu guna mendorong pertumbuhannya.

### 2.2.3.6 Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hierarkhi tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral di dukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan

pendapatan persektor ini disebut sebagai Nilai Tambah Bruto (NTB) sektoral. Oleh karena itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Menggunakan Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di definisikan sebagai semua komponen permintaan akhir dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), komponen akhir tersebut adalah:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (tidak mencari untung)
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan stok
5. Eksport netto

**B. Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan Produk Domestik Bruto (PDRB) dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah.

Alokator yang dapat digunakan dalam metode tidak langsung, yaitu:

1. Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor atau sub sektor
2. Jumlah produksi fisik
3. Tenaga kerja
4. Penduduk
5. Alat ukur tidak langsung

**2.2.5 Metode Analisis Location Quotient (LQ)**

*Location Quotient (LQ)* adalah suatu perbandingan tentang besarnya suatu sektor atau industri di suatu daerah (Kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional (Propinsi). (Tarigan, 2004; 78).

Analisis *Location Quotient (LQ)* dapat di rumuskan sebagai berikut:

untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan.

Teknik analisis *Location Quotient (LQ)* mempunyai kelemahan antara lain: (1) Selera dan pola pengeluaran masyarakat adalah berlainan di setiap daerah; (2) Tingkat konsumsi rata-rata masyarakat tidak sama di setiap daerah; (3) keperluan produksi dan produktivitas tenaga kerja berbeda di setiap daerah.

### 2.2.6 Metode Analisis Dynamic Location Quotient

*Prinsip Dynamic Location Quotient (DLQ)* sebenarnya sama dengan *Location Quotient*, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu. Tafsiran DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika  $DLQ=1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) sama dengan proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap daerah himpunannya. Jika  $DLQ < 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap daerah himpunannya. Kondisi demikian pada masa depan sektor tersebut akan kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain. Jika  $DLQ > 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap daerah himpunannya. Pada masa depan, kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, diharapkan sektor tersebut akan unggul dalam persaingan. Analisis DLQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuwono, 1999; 50):

$$Skalling = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

Keterangan:

N = Nilai pada *Location Quotient*

$N_{\min}$  = Nilai minimal pada *Location Quotient*

$N_{\max}$  = Nilai maksimal pada *Location Quotient*

### 2.2.8 Analisis Coeficient Reshuffle

*Coeficient Reshuffle (CR)* merupakan alat analisis yang menunjukkan pergeseran suatu sektor. Sektor yang ekonomi memiliki nilai  $CR > 0$ , maka sektor ekonomi ini memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang lebih kuat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki nilai  $CR < 0$  maka sektor ekonomi ini memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang semakin melemah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Sektor ekonomi mengalami pergeseran struktur dalam kurun waktu tertentu. Kecenderungan kekuatan pergeseran suatu sektor ditentukan dengan menggunakan analisis pergeseran yaitu analisis Coeficient Reshuffle (Warpani, 1984; 85)

Rumus dari Coeficient Reshuffle (CR) adalah (Warpani, 1984; 85):

$$CR = \frac{\% (VR_i / VR_{2003} - VR_i / VR_{1997}) - \% (V_i / V_{2003} - V_i / V_{1997})}{100}$$

Keterangan:

CR = *coeficient reshuffle* sektor ekonomi i di daerah bagian.

$VR_i$  = *vallue added* atau nilai tambah sektor ekonomi i di daerah bagian.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat deskripsi situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

##### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan yaitu perilaku aktivitas sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Pematang dilihat dari kontribusi PDRB, pertumbuhan dan peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Pematang dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 atas dasar harga konstan tahun 1993.

##### 3.1.3 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sembilan sektor ekonomi yang ada di kota Pematang yaitu sektor pertanian, sektor penggalian dan pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa persewaan, sektor jasa-jasa

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan waktu tahun 1997-2003, dengan alasan bahwa pada periode tersebut merupakan periode dinamis dan normal. Tahun 1997-1998 merupakan periode dimana ekonomi nasional mengalami kondisi krisis ekonomi.

##### 3.1.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pematang, berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Pematang merupakan daerah yang berpotensi terhadap perkembangan ekonomi wilayah Jawa Tengah.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi pemerintah antara lain Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data time series mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2003.

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Sektor Ekonomi Prioritas

Untuk mengetahui sektor ekonomi prioritas di Kabupaten Pemalang pada tahun 1997-2003 digunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Setelah kesembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pemalang di analisis dengan menggunakan metode diatas kemudian diolah dengan menggunakan *Skalling*, dimana sektor yang menjadi peringkat atau ranking pertama akan dijadikan sebagai sektor ekonomi prioritas di Kabupaten Pemalang.

##### 3.3.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui sektor ekonomi prioritas yang ada di Kabupaten Pemalang digunakan analisis *Location Quotient* pada masing-masing sektor ekonomi (Aziz, 1994 : 154). Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menganalisis nilai tambah suatu sektor menurut lapangan usaha. Rumus dari *Location Quotient* adalah sebagai berikut:

$$LQR_i = \frac{VR_i / VR}{Vi / V}$$

Keterangan:

$LQR_i$  = indeks LQ dari sektor ekonomi i yang ada di kabupaten Pemalang.

$VR_i$  = *value added* atau nilai tambah sektor ekonomi i di Kabupaten Pemalang.



- VR = jumlah seluruh *value added* atau nilai tambah sektor ekonomi di Kabupaten Pemalang.
- $V_i$  = *value added* atau nilai tambah sektor ekonomi  $i$  di Propinsi Jawa Tengah.
- V = jumlah seluruh *value added* atau nilai tambah sektor ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

Kriteria yang dipakai:

- $LQ > 1$  Berarti sektor  $i$  Kabupaten Pemalang merupakan sektor prioritas, karena unggul dalam persaingan dari sektor yang sama di daerah himpunan Propinsi Jawa Tengah.
- $LQ = 1$  Berarti sektor  $i$  Kabupaten Pemalang mempunyai kekuatan daya saing yang sama dengan sektor yang sama di daerah himpunan Propinsi Jawa Tengah.
- $LQ < 1$  Berarti sektor  $i$  Kabupaten Pemalang bukan termasuk sektor prioritas, karena kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan Propinsi Jawa Tengah.

### 3.3.1.2 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Untuk melengkapi kelemahan dari analisis *Location Quotient (LQ)* maka digunakan analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Prinsip *DLQ* sebenarnya sama dengan *LQ*, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB memiliki rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri di setiap tahunnya. (Yuwono, 1999: 50). Rumus dari analisis *Dynamic Location Quotient* adalah sebagai berikut :

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right\}^t$$

Keterangan:

- DLQ = indeks dari laju pertumbuhan sektor ekonomi  $i$  di Kabupaten Pemalang.

### 3.3.1.3 Analisis Skalling

Untuk mengetahui sektor prioritas yang ada di Kabupaten Pematang pada tahun 1997 sampe 2003 maka sebagai pertimbangannya digunakan nilai-nilai dari metode analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)* lalu di rangking dengan menggunakan analisa *Skalling*. (Budiharsono, 1989; 337). Rumus dari Skalling adalah sebagai berikut:

$$\text{Skalling} = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

Keterangan:

$N$  = Nilai pada *Location Quotient*.

$N_{\min}$  = Nilai minimal pada *Location Quotient*.

$N_{\max}$  = Nilai maksimal pada *Location Quotient*.

### 3.3.2 Analisis Coeficient Reshuffle (CR)

Untuk mengetahui pergeseran suatu sektor atau sub sektor prioritas di Kabupaten Pematang digunakan *Analisis Coeficient Reshuffle* (Warpani, 1984; 85):

$$CR = \frac{\% (VR_i / VR_{2003} - VR_i / VR_{1997}) - \% (V_i / V_{2003} - V_i / V_{1997})}{100}$$

Keterangan:

$CR$  = *coeficient reshuffle* sektor ekonomi i di daerah Pematang.

$VR_i$  = *vallue added* atau nilai tambah sektor ekonomi i di daerah Pematang.

$VR$  = jumlah semua *vallue added* atau nilai tambah sektor ekonomi di daerah Pematang.

$V_i$  = *vallue added* atau nilai tambah sektor ekonomi i di Propinsi Jawa Tengah.

$V$  = jumlah *vallue added* sektor ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

Kriteria yang dipakai:

$CR > 0$ , berarti sektor ekonomi  $i$  memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang lebih kuat dibandingkan dengan sektor yang lainnya

$CR < 0$ , berarti sektor ekonomi  $i$  memberikan nilai yang besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang semakin melemah dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

$CR = 0$ , berarti sektor ekonomi  $i$  menambah nilai yang lebih tinggi pada kegiatan pembangunan ekonomi.

### 3.4 Definisi Variabel Operasional

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka digunakan batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi prioritas adalah sektor ekonomi yang diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan disuatu wilayah dan dapat mendorong sektor ekonomi lainnya untuk berkembang di wilayah tersebut.
2. Pembangunan ekonomi wilayah adalah tingkat perubahan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi suatu wilayah dinyatakan dalam satuan persentase pertahun.
3. Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh sembilan sektor (lapangan usaha) yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Pematang dan di daerah himpunan Propinsi Jawa Tengah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Metode pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDRB yaitu pendekatan produksi dalam satuan Rp/th.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

#### 4.1.1 Keadaan dan Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang secara Geografis terletak diantara  $109^{\circ}17'30''$  -  $109^{\circ}40'30''$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}52'30''$  -  $7^{\circ}20'11''$  Lintang Selatan.

Dilihat dari segi batas wilayah Kabupaten Pemalang sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

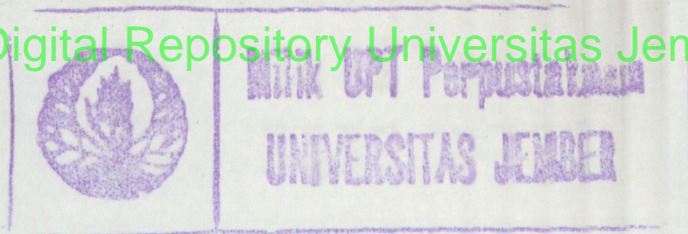
Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 111.530 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 38.694 Ha dan luas tanah kering 72.836 Ha. Wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan. Kecamatan dari yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman Kecamatan Ulujami, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Moga.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Pemalang terdiri dari daerah pantai yaitu daerah dengan ketinggian antara 1 – 5 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini meliputi 17 desa dan 1 kelurahan terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang. Daerah dataran rendah yaitu daerah dengan ketinggian antara 6 – 15 di atas permukaan air laut. Daerah ini meliputi 94 desa dan 4 kelurahan terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang. Daerah dataran tinggi yaitu daerah dengan ketinggian antara 16 – 212 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Pemalang. Daerah pegunungan, terbagi menjadi 2 yaitu: daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini meliputi 55 desa, terletak di bagian wilayah Kabupaten Pemalang. Daerah dengan ketinggian 925 meter di atas permukaan air laut, terletak di bagian selatan meliputi 10 desa yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.

#### 4.1.2 Keadaan Penduduk di Kabupaten Pematang

Dalam pembangunan ekonomi daerah, penduduk mempunyai peranan penting karena aktivitas pembangunan ekonomi memerlukan peran serta penduduk di segala bidang. Dalam hal ini jumlah penduduk di suatu daerah sangat berpengaruh untuk menentukan tingkat vitalitas masyarakat. Jumlah penduduk yang banyak dan juga berkualitas akan menjadi asset pembangunan yang besar tetapi jika jumlah penduduk banyak namun tidak diiringi dengan kualitas yang baik maka penduduk tersebut akan menjadi beban bagi pembangunan di daerah tersebut.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2003, Kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar adalah Kecamatan Pematang dengan jumlah rumah tangga sebesar 40.688 rumah tangga, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Warungpring dengan jumlah rumah tangga sebesar 8.894 rumah tangga. Pada tahun 2003 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pematang dengan jumlah penduduk sebesar 175.907 jiwa, sedangkan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Warungpring dengan jumlah penduduk sebesar 38.758 jiwa. Pada tahun 2003 Kecamatan yang memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar adalah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Taman dan Kecamatan Comal dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4,7 anggota rumah tangga, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Ampelgading dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4,1 anggota rumah tangga.



**Tabel 2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Pemalang Dirinci Per Kecamatan Tahun 2003**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup> (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Moga	41,4	1.633
Warungpring	26,31	1.473
Pulosari	87,52	599
Belik	124,54	794
Watukumpul	129,02	490
Bodeh	85,98	655
Bantarbolang	139,19	565
Randudongkal	90,32	1.147
Pemalang	101,93	1.726
Taman	67,41	2.326
Petarukan	81,29	1.861
Ampelgading	53,30	1.206
Comal	26,54	3.131
Ulujami	60,55	1.731
Jumlah	1.115,30	19.337

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2003, 2004 : 38

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2003 persentase penduduk Kabupaten Pemalang yang telah menamatkan Sekolah Dasar adalah sebesar 31,93 %, sedangkan yang tidak atau belum pernah sekolah adalah sebesar 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2003 sebagian besar penduduk Kabupaten Pemalang telah mempunyai kesempatan menikmati pendidikan dasar. Penduduk yang tidak atau belum tamat Sekolah Dasar adalah 30,60 %, tamat SMP sebesar 8,81 %, tamat SMU sebesar 4,60 % dan penduduk yang sudah tamat akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,04 %.

**Tabel 3 Jumlah Penduduk (Usia 5 Tahun Ke Atas) Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2003 (Jiwa)**

Tingkat Pendidikan	Jiwa	Persentase (%)
Tidak atau belum pernah sekolah	145.117	24,00
Tidak atau belum tamat SD	185.137	30,60
Tamat SD	193.053	31,93
Tamat SMP	53.199	8,81
Tamat SMU	27.819	4,60
Tamat Akademi atau Perguruan Tinggi	222	0,04
Jumlah	604.547	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2003, 2004 : 89

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berturut-turut berada pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah sebesar 159.239 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 12,29 %, kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah sebesar 158.217 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 12,21 %, kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah sebesar 145.115 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 11,20 %, kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah sebesar 133.513 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase sebesar 10,31 %, kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah sebesar 112.067 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase sebesar 8,65 %, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 60-64 tahun dengan jumlah sebesar 36.994 jiwa atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 2,86 %.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa pekerjaan penduduk di Kabupaten Pematang menurut sektor ekonomi yang dominan secara berturut-turut dari yang terbesar adalah bekerja dalam bidang sektor pertanian yaitu sebesar 377.078 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 53,48 %, pada sektor lain-lain sebesar 126.098 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 17,89 %, pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 85.553 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 12,13 %, pada sektor industri pengolahan sebesar 45.675 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 6,48 %, pada sektor bangunan sebesar 36.219 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 5,14 %, pada sektor jasa-jasa sebesar 17.836 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 2,53 %, dan yang terkecil adalah pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 16.564 atau jika dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 2,35 %. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2003 sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kemampuan menyediakan kesempatan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain.

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pemalang Menurut Kelompok Umur Tahun 2003**

Umur (Tahun)	Penduduk			
	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah	Persentase (%)
0-4	73.076	72.039	145.115	11,20
5-9	78.986	79.231	158.217	12,21
10-14	79.678	79.561	159.239	12,29
15-19	66.788	66.725	133.513	10,31
20-24	56.161	55.906	112.067	8,65
25-29	50.258	51.821	102.079	7,88
30-34	44.005	44.613	88.618	6,84
35-39	39.915	41.079	80.994	6,25
40-44	35.301	36.401	71.702	5,53
45-49	27.248	28.403	55.651	4,30
50-54	24.775	27.419	52.194	4,03
55-59	21.611	24.401	46.012	3,55
60-64	17.233	19.761	36.994	2,86
65+	24.558	28.625	53.183	4,10
<b>Jumlah</b>	639.593	655.985	1.295.578	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2003, 2004 : 57

**Tabel 5 Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pemalang Tahun 2003 (Jiwa)**

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Pertanian	377.078	53,48
2	Industri Pengolahan	45.675	6,48
3	Bangunan	36.219	5,14
4	Pedagangan, Hotel dan Restoran	85.553	12,13
5	Pengangkutan dan Komunikasi	16.564	2,35
6	Jasa-jasa	17.836	2,53
7	Lain-lain	126.098	17,89
	<b>Jumlah</b>	705.023	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2003, 2004 : 92

#### 4.1.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program-program pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah tersebut dalam segala sektor, baik dilihat dari tingkat kemakmuran regional maupun peranan sektor yang dimiliki daerah tersebut.



aktivitas pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan dibidang ekonomi.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan kegiatan ekonomi kedalam tiga sektor, masing-masing sektor tersebut adalah pertama sektor primer (agriculture), adalah kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumberdaya alam secara langsung tanpa adanya proses pengolahan, yang termasuk kegiatan ekonomi ini meliputi sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan. Kedua adalah sektor sekunder (manufacture), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah sumberdaya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi, yang termasuk kegiatan ekonomi ini meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air minum serta sektor bangunan. Ketiga adalah sektor tersier (service) yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tetapi menghasilkan jasa, yang termasuk kegiatan ekonomi ini meliputi sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa serta sektor jasa-jasa.

Perubahan dan perkembangan struktur perekonomian wilayah dapat dilihat dari komposisi ketiga sektor tersebut dalam perekonomian wilayah. Semakin besar proporsi sektor sekunder dan sektor tersier dapat dikatakan bahwa perekonomian di wilayah tersebut menuju kearah kemajuan.

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003 lebih didominasi oleh sektor tersier dengan nilai proporsi lebih dari 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pematang mulai menuju kearah yang lebih baik karena sektor tersier memiliki peranan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder. Sumbangan rata-rata yang diberikan sektor tersier terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pematang adalah sebesar 41,29 %, sektor primer sebesar 34,92 %, dan sumbangan rata-rata yang diberikan sektor sekunder terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pematang adalah sebesar 23,79 %. Hal ini berarti bahwa sektor sekunder kurang memiliki peranan terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pematang.

dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88 %, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,38 %, sektor penggalian dan pertambangan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,42 %, dan sektor listrik dan air minum dengan laju pertumbuhan sebesar 9,95 %.

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 adalah sektor jasa-jasa dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,25 %, sektor keuangan dan persewaan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,24 %, sektor bangunan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,23 %, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,17 %, sektor perdagangan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,04 %, sektor listrik dan air minum dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,02 %, sektor pertanian dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -0,04 %, sektor industri pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -0,10 %, dan yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -0,13 %,



**Tabel 8 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pematang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Dalam Persen)**

No	Sektor Ekonomi	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata - Rata
1	Pertanian	2,78	0,63	-1,68	1,81	0,33	0,84	2,14	-0,04
2	Penggalian dan Pertambangan	13,79	3,42	12,48	12,78	12,18	5,77	5,94	-0,13
3	Industri Pengolahan	9,51	0,37	3,73	5,94	6,98	4,32	-5,23	-0,10
4	Listrik dan Air Minum	8,78	9,95	13,72	15,13	44,76	11,23	10,07	0,02
5	Bangunan	0,98	-32,16	2,70	0,43	-3,64	3,09	3,39	0,23
6	Perdagangan	5,79	-0,64	2,78	3,88	3,60	4,43	7,28	0,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,03	1,38	7,16	5,21	4,87	4,88	9,95	0,17
8	Keuangan dan Persewaan	3,03	-7,68	0,27	4,04	4,66	6,05	10,93	0,24
9	Jasa-jasa	3,26	0,88	2,94	3,93	3,72	6,42	12,11	0,25
	Kabupaten	4,76	-1,64	1,59	3,71	3,24	3,58	3,77	

Sumber: Lampiran 3, diolah

## 4.2 Analisis

### 4.2.1 Analisis Sektor Ekonomi Prioritas

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah dapat disusun menurut tinjauan antar sektor. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu yang memiliki keunggulan untuk dijadikan sebagai sektor yang layak untuk diprioritaskan.

Untuk mengetahui sektor ekonomi yang layak untuk diprioritaskan di Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003 digunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Setelah kesembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pematang di analisis dengan menggunakan metode diatas kemudian diolah dengan menggunakan *Skalling*, dimana sektor yang menjadi peringkat atau ranking pertama akan dijadikan sebagai sektor ekonomi yang layak untuk diprioritaskan di Kabupaten Pematang.

#### 4.2.1.1 Analisis Location Quotient

Location Quotient merupakan alat analisis yang membandingkan kemampuan sektor-sektor pembangunan yang ada pada suatu daerah atau wilayah dengan kondisi sektor-sektor pembangunan yang ada di daerah himpunannya atau di daerah yang lebih luas. Misalnya sektor-sektor pembangunan yang ada di tingkat Kabupaten di bandingkan dengan sektor-sektor pembangunan yang ada di tingkat Propinsi.

Dari hasil perhitungan Location Quotient sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pematang menurut lapangan usaha dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya didapatkan nilai skalling (lihat lampiran 15) ,yang nantinya nilai skalling setiap tahunnya tersebut dijumlahkan sehingga akan menghasilkan nilai reskalling, nilai reskalling tersebut kemudian dirangking dari peringkat satu sampai dengan peringkat sembilan (lihat tabel 9), dengan asumsi bahwa sektor yang menempati peringkat pertama adalah sektor yang layak untuk di prioritaskan.

**Tabel 9 Skalling Location Quotient (LQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003**

No	Sektor Ekonomi	Location Quotient							Reskalling	Rangking
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		
1	Pertanian	1,83	1,71	1,66	1,64	1,62	5,80	6,40	100,00	1
2	Penggalian Dan Pertambangan	0,72	0,72	0,78	0,86	0,89	3,22	3,47	18,22	7
3	Industri Pengolahan	0,58	0,61	0,62	0,64	0,67	2,38	2,27	0,00	9
4	Listrik Dan Air Minum	0,82	0,78	0,82	0,86	0,96	3,43	3,97	23,65	5
5	Bangunan	1,00	0,90	0,84	0,83	0,78	2,76	2,94	20,43	6
6	Perdagangan	0,97	0,95	0,97	0,94	0,93	3,36	3,64	30,67	4
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	0,82	0,75	0,74	0,74	0,72	2,55	2,82	10,63	8
8	Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan	1,05	1,32	1,30	1,32	1,37	5,02	13,80	76,43	2
9	Jasa-Jasa	0,92	0,92	0,97	1,00	1,02	3,73	4,39	34,42	3

Sumber: Lampiran 15, diolah

Dari data pada tabel 9 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang menempati peringkat pertama dengan nilai skalling 100 adalah sektor pertanian dengan asumsi bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki keunggulan komparatif dibanding daerah himpunannya dan merupakan sektor yang layak untuk diprioritaskan pada analisis ini, sedangkan yang menempati peringkat kedua adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan nilai skalling sebesar 76,43, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan nilai skalling sebesar 34,42, yang menempati peringkat keempat adalah sektor perdagangan dengan nilai skalling sebesar 30,67, yang menempati peringkat kelima adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai skalling sebesar 23,65, yang menempati peringkat keenam adalah sektor bangunan dengan nilai skalling sebesar 20,43, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai skalling sebesar 18,22, yang menempati peringkat kedelapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai skalling sebesar 10,63, dan yang menempati peringkat kesembilan adalah sektor industri dan pengolahan dengan nilai skalling sebesar 0,00 dengan asumsi bahwa sektor yang berada pada peringkat terakhir ini kurang memiliki keunggulan komparatif sehingga pada analisis ini sektor tersebut kurang layak untuk diprioritaskan.

#### 4.2.1.2 Analisis Dynamic Location Quotient

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) hampir sama dengan analisis Location Quotient (LQ), hanya saja pada analisis DLQ lebih bersifat dinamis. Analisis DLQ mampu menentukan sektor yang layak untuk diprioritaskan dalam pembangunan mulai dari tahun awal analisis sampai dengan tahun akhir analisis, sedangkan analisis LQ hanya mampu menentukan sektor prioritas pembangunan pada tahun-tahun tertentu saja. Analisis DLQ ini mempunyai asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun 0 sampai dengan tahun t.

Dari hasil perhitungan Dynamic Location Quotient sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pematang menurut lapangan usaha dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya didapatkan nilai skalling yang nantinya

didapatkan juga nilai reskalling dengan melalui tehnik perhitungan yang sama, dari nilai reskalling tersebut kemudian dirangking dari peringkat satu sampai dengan peringkat sembilan (lihat tabel 10), dengan asumsi bahwa sektor yang menempati peringkat pertama adalah sektor yang layak untuk diprioritaskan dan sektor yang menempati peringkat terakhir adalah sektor yang kurang layak untuk diprioritaskan.

**Tabel 10 Skalling Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003**

No	Sektor Ekonomi	DLQ	Skalling	Reskalling	Rangking
1	Pertanian	0,143085	5,37	5,37	7
2	Penggalian dan Pertambangan	0,199376	18,37	18,37	3
3	Industri Pengolahan	0,162172	9,78	9,78	5
4	Listrik dan Air Minum	0,200421	18,60	18,60	2
5	Bangunan	0,119848	0,00	0,00	9
6	Perdagangan	0,153682	7,81	7,81	6
7	Pengangkutan dan komunikasi	0,141084	4,90	4,90	8
8	Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	0,552810	100,00	100,00	1
9	Jasa-jasa	0,196841	17,78	17,78	4

Sumber: Lampiran 16, diolah

Dari data pada tabel 10 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang menempati peringkat pertama dengan nilai skalling 100 dan nilai DLQ sebesar 0,552810 adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan asumsi bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki keunggulan komparatif dibanding daerah himpunannya dan merupakan sektor yang layak untuk diprioritaskan pada analisis ini, sedangkan yang menempati peringkat kedua adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling 18,60 dan nilai DLQ sebesar 0,200421, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling 18,37 dan nilai DLQ sebesar 0,199376, yang menempati peringkat keempat adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling 17,78 dan nilai DLQ sebesar 0,196841, yang menempati peringkat kelima adalah sektor industri pengolahan dengan nilai reskalling 9,78 dan nilai DLQ sebesar 0,162172, yang

yang menempati peringkat kelima adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling sebesar 17,22, yang menempati peringkat keenam adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling sebesar 16,09, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor bangunan dengan nilai reskalling sebesar 6,39, yang menempati peringkat kedelapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai reskalling sebesar 3,45, dan yang menempati peringkat terakhir yaitu peringkat kesembilan dengan nilai reskalling sebesar 0 adalah sektor industri pengolahan dengan asumsi bahwa sektor ini kurang memiliki keunggulan komparatif dan kurang memiliki andil dalam pembangunan Kabupaten Pemalang sehingga sektor ini kurang layak untuk dijadikan sektor prioritas.

**Tabel 11 Total Skalling Berdasarkan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003**

No	Sektor Ekonomi	Reskalling LQ	Reskalling DLQ	Total Skalling	Reskalling	Rangking
1	Pertanian	100	5,37	105,37	57,36	2
2	Penggalian Dan Pertambangan	18,22	18,37	36,59	16,09	6
3	Industri Pengolahan	0	9,78	9,78	0,00	9
4	Listrik Dan Air Minum	23,65	18,6	42,25	19,48	4
5	Bangunan	20,43	0	20,43	6,39	7
6	Perdagangan	30,67	7,81	38,48	17,22	5
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	10,63	4,9	15,53	3,45	8
8	Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan	76,43	100	176,43	100,00	1
9	Jasa-Jasa	34,42	17,78	52,20	25,45	3

Sumber: Lampiran 17, diolah

#### 4.2.2 Analisis Coeficient Reshuffle

Sektor ekonomi mengalami pergeseran struktur dalam kurun waktu tertentu. Kecenderungan kekuatan pergeseran suatu sektor ditentukan dengan menggunakan analisis pergeseran yaitu analisis Coeficient Reshuffle.

Dari hasil perhitungan coefficient reshuffle sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Pematang menurut lapangan usaha dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 setiap tahunnya didapatkan nilai skalling yang nantinya didapatkan juga nilai reskalling dengan melalui tehnik perhitungan yang sama, dari nilai reskalling tersebut kemudian dirangking dari peringkat satu sampai dengan peringkat sembilan (lihat tabel 12), dengan asumsi bahwa sektor yang menempati peringkat pertama adalah sektor yang layak untuk diprioritaskan dan sektor yang menempati peringkat terakhir merupakan sektor yang kurang layak untuk diprioritaskan.

Sektor yang memiliki nilai coefficient reshuffle positif maka sektor tersebut akan mengalami kecenderungan pergeseran yang lebih kuat di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sedangkan sektor yang memiliki nilai coefficient reshuffle negatif maka sektor tersebut akan mengalami kecenderungan pergeseran yang melemah di masa yang akan datang.

**Tabel 12 Skalling Coeficient Reshuffle Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003**

No	Sektor Ekonomi	CR	SKALLING	RESKALLING	RANGKING
1	Pertanian	-0,001561	0,00	0,00	9
2	Penggalian Dan Pertambangan	0,000039	54,81	54,81	5
3	Industri Pengolahan	0,001359	100,00	100,00	1
4	Listrik Dan Air Minum	0,000018	54,07	54,07	6
5	Bangunan	0,000000	53,47	53,47	7
6	Perdagangan	0,000075	56,04	56,04	4
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	0,000076	56,08	56,08	3
8	Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan	-0,000022	52,71	52,71	8
9	Jasa-Jasa	0,000090	56,53	56,53	2

Sumber: Lampiran 18, diolah

Dari data pada tabel 12 dapat diketahui bahwa ada tujuh sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan pergeseran menguat di masa yang akan datang. Sektor yang memiliki pergeseran yang paling kuat di masa yang akan datang dan menempati peringkat pertama dengan nilai reskalling 100 dan nilai coefficient



reshuffle sebesar 0,001359 adalah sektor industri pengolahan, kemudian secara berturut-turut yang menempati peringkat kedua adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling 56,53 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000090, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai reskalling 56,08 dan nilai coeficien reshuffle sebesar 0,000076, yang menempati peringkat keempat adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling 56,04 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000075, yang menempati peringkat kelima adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling 54,81 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000039, yang menempati peringkat keenam adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling 54,02 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000016, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor bangunan dengan nilai reskalling 53,47 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000000, sedangkan yang memiliki nilai coefficient reshuffle negatif dan menempati peringkat kedelapan adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan nilai reskalling 52,71 dan nilai coefficient reshuffle sebesar -0,000022, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang menempati peringkat kesembilan dengan nilai reskalling 0 dan nilai coefficient reshuffle sebesar -0,001561. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan sektor pertanian memiliki kecenderungan pergeseran yang melemah pada masa yang akan datang.

### 4.3 Pembahasan

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumberdaya yang dimiliki. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan sektor-sektor yang layak untuk diprioritaskan dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dibuat berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah perlu dilaksanakan oleh suatu daerah karena adanya keterbatasan sumberdaya dan sumber dana bagi pembangunan,

sedangkan disisi lain banyak target atau tujuan pembangunan yang akan dicapai. Keterbatasan dana tersebut mengharuskan perencanaan pembangunan untuk mengalokasikan dana yang ada pada sektor yang akan dikembangkan lebih lanjut.

Perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan pendekatan sektoral yaitu dengan cara mengidentifikasi masing-masing sektor sehingga dapat diketahui potensinya. Setelah diketahui potensi masing-masing sektor yaitu kekuatan dan kelemahan maka dapat ditentukan sektor yang layak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil dari analisis sektor ekonomi prioritas melalui analisis yang pertama yaitu analisis Location Quotient (LQ) dapat diambil kesimpulan bahwa sektor yang menempati peringkat pertama dan layak untuk diprioritaskan pada analisis ini adalah sektor pertanian dengan nilai reskalling sebesar 100 dengan asumsi bahwa sektor ini merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan daerah himpunannya, sedangkan yang menempati peringkat kedua adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan nilai skalling sebesar 76,43, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan nilai skalling sebesar 34,42, yang menempati peringkat keempat adalah sektor perdagangan dengan nilai skalling sebesar 30,67, yang menempati peringkat kelima adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai skalling sebesar 23,65, yang menempati peringkat keenam adalah sektor bangunan dengan nilai skalling sebesar 20,43, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai skalling sebesar 18,22, yang menempati peringkat kedelapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai skalling sebesar 10,63, dan yang menempati peringkat kesembilan adalah sektor industri dan pengolahan dengan nilai skalling sebesar 0,00.

Berdasarkan hasil dari analisis sektor ekonomi prioritas melalui analisis yang kedua yaitu analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) dapat diambil kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang menempati peringkat pertama dengan nilai skalling 100 dan nilai DLQ sebesar 0,552810 adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan asumsi bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki keunggulan komparatif dibanding daerah himpunannya dan merupakan sektor

yang layak untuk diprioritaskan pada analisis ini, sedangkan yang menempati peringkat kedua adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling 18,60 dan nilai DLQ sebesar 0,200421, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling 18,37 dan nilai DLQ sebesar 0,199376, yang menempati peringkat keempat adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling 17,78 dan nilai DLQ sebesar 0,196841, yang menempati peringkat kelima adalah sektor industri pengolahan dengan nilai reskalling 9,78 dan nilai DLQ sebesar 0,162172, yang menempati peringkat keenam adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling 7,81 dan nilai DLQ sebesar 0,153682, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor pertanian dengan nilai reskalling 5,37 dan nilai DLQ sebesar 0,143085, yang menempati peringkat kedelapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai reskalling 4,90 dan nilai DLQ sebesar 0,141084, sektor yang menempati peringkat kesembilan adalah sektor bangunan dengan nilai reskalling 0,00 dan nilai DLQ sebesar 0,119848, dengan asumsi bahwa sektor ini belum layak untuk diprioritaskan.

Dari masing-masing analisis yang digunakan yaitu analisis LQ dan DLQ ternyata menggambarkan hasil yang berbeda, untuk menentukan sektor yang layak untuk diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Pematang maka digunakan analisis skalling. Analisis skalling didapat dari hasil reskalling pada analisis LQ dan DLQ. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi yang memiliki nilai reskalling 100 dan menempati peringkat pertama adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan asumsi bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan memiliki andil yang cukup besar terhadap pembangunan di Kabupaten Pematang sehingga sektor ini merupakan sektor yang layak untuk diprioritaskan, yang menempati peringkat kedua adalah sektor pertanian dengan nilai reskalling sebesar 57,36, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling sebesar 25,45, yang menempati peringkat keempat adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling sebesar 19,48, yang menempati peringkat kelima adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling sebesar 17,22, yang menempati peringkat keenam adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling

## V SIMPULAN SERTA SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari keempat alat analisis dan pembahasan didalam penelitian mengenai penentuan sektor ekonomi prioritas guna pembangunan wilayah Kabupaten Pematang pada tahun 1997-2003, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi prioritas yang berada di Kabupaten Pematang dengan tahun analisis 1997 sampai dengan 2003 yaitu diperingkat pertama adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan nilai reskalling 100, yang menempati peringkat kedua adalah sektor pertanian dengan nilai reskalling sebesar 57,36, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling sebesar 25,45, yang menempati peringkat keempat adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling sebesar 19,48, yang menempati peringkat kelima adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling sebesar 17,22, yang menempati peringkat keenam adalah sektor penggalian dan pertambangan dengan nilai reskalling sebesar 16,09, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor bangunan dengan nilai reskalling sebesar 6,39, yang menempati peringkat kedelapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai reskalling sebesar 3,45, dan yang menempati peringkat terakhir yaitu peringkat kesembilan dengan nilai reskalling sebesar 0 adalah sektor industri pengolahan.
2. Ada tujuh sektor yang memiliki pergeseran yang menguat di masa yang akan datang dan ada dua sektor yang memiliki pergeseran melemah di masa yang akan datang terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pematang. Sektor yang mengalami pergeseran menguat dan menempati peringkat pertama dengan nilai reskalling 100 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,001359 adalah sektor industri pengolahan, kemudian yang menempati peringkat kedua adalah sektor jasa-jasa dengan nilai reskalling 56,53 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000090, yang menempati peringkat ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai reskalling 56,08 dan nilai coeficien reshuffle sebesar 0,000076, yang menempati peringkat keempat adalah sektor perdagangan dengan nilai reskalling 56,04 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000075, yang menempati peringkat kelima adalah sektor

penggalan dan pertambahan dengan nilai reskalling 54,81 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000039, yang menempati peringkat keenam adalah sektor listrik dan air minum dengan nilai reskalling 54,02 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000016, yang menempati peringkat ketujuh adalah sektor bangunan dengan nilai reskalling 53,47 dan nilai coefficient reshuffle sebesar 0,000000, sedangkan dua sektor yang memiliki pergeseran melemah yaitu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan yang menempati peringkat kedelapan dengan nilai reskalling 52,71 dan nilai coefficient reshuffle sebesar  $-0,000022$ , dan yang terakhir adalah sektor pertanian yang menempati peringkat kesembilan dengan nilai reskalling 0 dan nilai coefficient reshuffle sebesar  $-0,001561$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang perlu disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pematang mengambill langkah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pematang hendaknya Pemerintah Kabupaten Pematang memperhatikan sektor yang perlu untuk diprioritaskan yaitu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
2. Pemerintah Kabupaten Pematang hendaknya mempertimbangkan sektor yang akan menguat dimasa yang akan datang meskipun sektor tersebut bukan merupakan sektor yang perlu diprioritaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: FE UI
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 1997. *Kabupaten Pemalang Dalam Angka*. Pemalang
- Budiharsono, S. 1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: FE UI
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Pembangunan: Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta: LP3ES
- Handoko, Budiono Sri. 2002. *Pembangunan Ekonomi Dan Kebijakan Regional*. Yogyakarta: FE UGM
- Khasanah, N. 2002. *Analisis Sektor Ekonomi Prioritas Guna Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 1994-1999*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember: FE UNEJ
- Nuryasman. 1996. *Pengembangan Konsep Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Media Ekonomi Universitas Tri Sakti
- Syaodatiningsih. 2002. *Penentuan Sektor Prioritas Dalam Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Lamongan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember: FE UNEJ
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tim Penyusun Penulisan Karya Ilmiah. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Warpani, S. 1984. *Analisis Kota Dan Daerah*. Bandung: ITB
- Yuwono, P. 1999. Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/ 1999 dan UU 25/ 1999. Dalam *Kritis* volume XII no. 2. Yogyakarta

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	PERTANIAN	367,0609	369,3179	363,1803	369,7703	370,9769	374,1014	382,1206
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	10,2780	10,6297	11,9567	13,485	15,1280	16,0013	16,9510
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	192,3655	193,0715	200,2743	212,1702	226,9769	236,7767	224,3885
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	7,8349	8,6147	9,7964	11,2708	12,9433	14,3971	15,8475
5	BANGUNAN	52,3348	35,5016	36,4602	36,6171	35,2825	36,3710	37,6053
6	PERDAGANGAN	228,1089	226,6576	232,9612	241,9945	250,7087	261,8273	280,8910
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	35,2884	35,7757	38,3369	40,3328	42,2986	44,3608	48,7748
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	58,5115	54,0179	54,1663	56,3530	58,9791	62,5472	69,3857
9	JASA-JASA	99,1817	100,0533	102,9981	107,0425	111,0203	118,1455	132,4533
	TOTAL PDRB	1050,9647	1033,6941	1050,1304	1089,0437	1124,3144	1164,5283	1208,4177

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	PERTANIAN	8216076,20	7940632,03	8184670,67	8455973,17	8598967,96	8667627,13	8593295,01
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	587426,67	545662,76	575612,99	589963,73	642027,09	667593,55	703109,51
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	13709758,32	11707062,06	12036861,68	12421426,24	12819594,90	13374259,62	14210959,35
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	393556,61	407879,93	450221,11	493724,43	509108,39	564173,77	574766,33
5	BANGUNAN	2139684,69	1452845,56	1626238,40	1650463,27	1693045,33	1767960,23	1837807,02
6	PERDAGANGAN	9612930,14	8747296,31	9026900,22	9632603,63	10092087,90	10459420,57	11088351,92
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1766846,11	1765265,71	1946926,99	2053018,42	2219896,60	2339634,18	2487687,39
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	2283522,22	1502666,55	1559305,07	1605968,13	1622747,76	1674959,71	723100,52
9	JASA-JASA	4420088,54	3995962,44	3987776,61	4038526,07	4107700,47	4260064,32	4338031,40
	TOTAL PDRB	43129838,90	38065273,35	39394513,74	40941667,09	42305176,40	456418300,46	473852789,13

Lampiran 3. Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Dalam Persen)

NO	SEKTOR EKONOMI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	PERTANIAN	2,78	0,63	-1,68	1,81	0,33	0,84	2,14
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	13,79	3,42	12,48	12,78	12,18	5,77	5,94
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9,51	0,37	3,73	5,94	6,98	4,32	-5,23
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	8,78	9,95	13,72	15,13	44,76	11,23	10,07
5	BANGUNAN	0,98	-32,16	2,7	0,43	-3,64	3,09	3,39
6	PERDAGANGAN	5,79	-0,64	2,78	3,88	3,6	4,43	7,28
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	4,03	1,38	7,16	5,21	4,87	4,88	9,95
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	3,03	-7,68	0,27	4,04	4,66	6,05	10,93
9	JASA-JASA	3,26	0,88	2,94	3,93	3,72	6,42	12,11

Lampiran 4. Perhitungan Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KABUPATEN PEMALANG	VR <sub>i</sub> /VR	PDRB PROPINSI JAWA TENGAH	V <sub>i</sub> /V	LQ
1	PERTANIAN	367,0609	0,349260	8216026,20	0,190495	1,83
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	10,2780	0,009780	587426,67	0,013620	0,72
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	192,3655	0,183037	13709758,32	0,317872	0,58
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	7,8349	0,183037	393556,61	0,009125	0,82
5	BANGUNAN	52,3348	0,007455	2139684,69	0,049610	1,00
6	PERDAGANGAN	228,1089	0,049797	9612930,14	0,222884	0,97
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	35,2884	0,217047	1766846,11	0,040966	0,82
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	58,5115	0,033577	2283522,22	0,052945	1,05
9	JASA-JASA	99,1817	0,055674	4420088,54	0,102483	0,92
	TOTAL PDRB	1050,9647		43129838,90		

Lampiran 5. Perhitungan Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1998 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KABUPATEN PEMALANG	VR <sub>i</sub> /VR	PDRB PROPINSI JAWA TENGAH	V <sub>i</sub> /V	LQ
1	PERTANIAN	369,3179	0,357280	7940632,03	0,208606	1,71
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	10,6297	0,010283	545662,76	0,014335	0,72
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	193,0715	0,186778	11707062,06	0,307552	0,61
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	8,6147	0,186778	407879,93	0,010715	0,78
5	BANGUNAN	35,5016	0,008334	1452845,56	0,038167	0,90
6	PERDAGANGAN	226,6576	0,034344	8747276,31	0,229797	0,95
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	35,7757	0,219270	1765265,71	0,046375	0,75
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	54,0179	0,034610	1502666,55	0,039476	1,32
9	JASA-JASA	100,0533	0,052257	3995962,44	0,104977	0,92
	TOTAL PDRB	1033,6941		38065273,35		

Lampiran 6. Perhitungan Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KABUPATEN PEMALANG	VR <sub>i</sub> /VR	PDRB PROPINSI JAWA TENGAH	V <sub>i</sub> /V	LQ
1	PERTANIAN	363,1803	0,345843	8184670,67	0,207762	1,60
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	11,9567	0,011386	575612,99	0,014612	0,78
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	200,2743	0,190714	12036861,68	0,305547	0,62
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	9,7964	0,190714	450221,11	0,011429	0,82
5	BANGUNAN	36,4602	0,009329	1626238,40	0,041281	0,84
6	PERDAGANGAN	232,9612	0,034720	9026900,22	0,229141	0,90
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	38,3369	0,221840	1946926,99	0,049421	0,74
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	54,1663	0,036507	1559305,07	0,039582	1,30
9	JASA-JASA	102,9981	0,051581	3987776,61	0,101227	0,92
	TOTAL PDRB	1050,1304		39394513,74		



Lampiran 10. Perhitungan Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KABUPATEN PEMALANG	VR <sub>i</sub> /VR	PDRB PROPINSI JAWA TENGAH	V <sub>i</sub> /V	LQ
1	PERTANIAN	382,1206	0,316216	8593295,01	0,049429	6,40
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	16,951	0,014027	703109,51	0,004044	3,47
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	224,3885	0,185688	14210959,35	0,081741	2,27
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	15,8475	0,185688	574766,33	0,003306	3,97
5	BANGUNAN	37,6053	0,013114	1837807,02	0,010571	2,94
6	PERDAGANGAN	280,891	0,031119	11088351,92	0,063780	3,64
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	48,7748	0,232445	2487687,39	0,014309	2,82
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	69,3857	0,040363	723100,52	0,004159	13,80
9	JASA-JASA	132,4533	0,057419	4338031,40	0,024952	4,39
	TOTAL PDRB	1208,4177		173852789,13		

Lampiran 11. Perhitungan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB 1997 (Y <sub>i</sub> )	PDRB 2003 (Y <sub>n</sub> )	g
1	PERTANIAN	367,0609	382,1206	0,01
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	10,2780	16,951	0,09
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	192,3655	224,3885	0,03
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	7,8349	15,8475	0,13
5	BANGUNAN	52,3348	37,6053	-0,05
6	PERDAGANGAN	228,1089	280,891	0,04
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	35,2884	48,7748	0,06
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	58,5115	69,3857	0,03
9	JASA-JASA	99,1817	132,4533	0,05
	TOTAL PDRB	1050,9647	1208,4177	0,37

Lampiran 12. Perhitungan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB 1997 (Y <sub>i</sub> )	PDRB 2003 (Y <sub>n</sub> )	G
1	PERTANIAN	8216026,20	8593295,01	0,01
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	587426,67	703109,51	0,03
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	13709758,32	14210959,35	0,01
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	393556,61	574766,33	0,07
5	BANGUNAN	2139684,69	1837807,02	-0,03
6	PERDAGANGAN	9612930,14	11088351,92	0,02
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1766846,11	2487687,39	0,06
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	2283522,22	723100,52	-0,18
9	JASA-JASA	4420088,54	4338031,40	0,00
	TOTAL PDRB	43129838,90	173852789,13	-0,01

Lampiran 13. Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	$(1+g_{ln})/(1+g_n)$	$(1+G_j)/(1+G)$	DLQ
1	PERTANIAN	0,736478	1,018343	0,143085
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,796398	1,041960	0,199376
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,750861	1,016788	0,162172
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,824516	1,077809	0,200421
5	BANGUNAN	0,691495	0,984806	0,119848
6	PERDAGANGAN	0,757807	1,035431	0,153682
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,772836	1,071127	0,141084
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	0,752967	0,831152	0,552810
9	JASA-JASA	0,768331	1,007386	0,196841
	TOTAL PDRB			

Lampiran 14. Perhitungan Coefficient Resuffle (CR) Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	%VR <sub>i</sub> /VR 1997	%V <sub>i</sub> /V 1997	%VR <sub>i</sub> /VR 2003	%V <sub>i</sub> /V 2003	4-2 (6)	5-3 (7)	CR=(6-7)/100 (8)
1	PERTANIAN	0,349260	0,190495	0,316216	0,049429	-0,346099	-0,190001	-0,001561
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,009780	0,013620	0,014027	0,004044	-0,009639	-0,013580	0,000039
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,183037	0,317872	0,185688	0,081741	-0,181180	-0,317054	0,001359
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,183037	0,009125	0,185688	0,003306	-0,007324	-0,009092	0,000018
5	BANGUNAN	0,007455	0,049610	0,013114	0,010571	-0,049486	-0,049505	0,000000
6	PERDAGANGAN	0,049797	0,222884	0,031119	0,063780	-0,214723	-0,222246	0,000075
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,217047	0,040966	0,232445	0,014309	-0,033174	-0,040823	0,000076
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	0,033577	0,052945	0,040363	0,004159	-0,055100	-0,052904	-0,000022
9	JASA-JASA	0,055674	0,102483	0,057419	0,024952	-0,093276	-0,102234	0,000090

Lampiran 15. Skalling Location Quotient (LQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2003 (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	LQ 1997	SKALLING 1997	LQ 1998	SKALLING 1998	LQ 1999	SKALLING 1999	LQ 2000	SKALLING 2000
1	PERTANIAN	1,83	100,00	1,71	100,00	1,66	100,00	1,64	100,00
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,72	11,31	0,72	9,96	0,78	14,90	0,86	21,68
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,58	0,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,64	0,00
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,82	19,18	0,78	15,42	0,82	18,46	0,86	21,57
5	BANGUNAN	1,00	34,03	0,90	26,46	0,84	20,85	0,83	19,16
6	PERDAGANGAN	0,97	31,65	0,95	31,38	0,97	33,06	0,94	30,18
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,82	19,39	0,75	12,57	0,74	11,01	0,74	9,62
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	1,05	37,83	1,32	64,81	1,30	65,26	1,32	67,58
9	JASA-JASA	0,92	27,44	0,92	28,47	0,97	33,14	1,00	35,37

NO	SEKTOR EKONOMI	LQ 2001	SKALLING 2001	LQ 2002	SKALLING 2002	LQ 2003	SKALLING 2003	TOTAL SKALLING (1997-2003)	RESKALLING	RANGKING
1	PERTANIAN	1,62	100,00	5,80	100,00	6,40	35,77	635,77	100,00	1
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,89	23,03	3,22	24,61	3,47	10,38	115,86	18,22	7
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,67	0,00	2,38	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	9
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,96	30,34	3,43	30,70	3,97	14,70	150,37	23,65	5
5	BANGUNAN	0,78	12,32	2,76	11,27	2,94	5,83	129,91	20,43	6
6	PERDAGANGAN	0,93	28,06	3,36	28,79	3,64	11,90	195,01	30,67	4
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,72	5,30	2,55	4,94	2,82	4,76	67,59	10,63	8
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	1,37	73,28	5,02	77,14	13,80	100,00	485,90	76,43	2
9	JASA-JASA	1,02	36,65	3,73	39,40	4,39	18,39	218,84	34,42	3

Lampiran 16. Skalling Dynamic Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	DLQ		SKALLING		RESKALLING		RANGKING	
1	PERTANIAN	0,143085	5,37	18,37	5,37	18,37	5,37	7	7
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,199376	18,37	9,78	18,37	9,78	18,37	3	3
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,162172	18,61	0,00	18,61	0,00	18,61	5	5
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,200421	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00	2	2
5	BANGUNAN	0,119848	7,81	4,90	7,81	4,90	7,81	9	9
6	PERDAGANGAN	0,153682	4,90	100,00	4,90	100,00	4,90	6	6
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,141084	100,00	17,78	100,00	17,78	100,00	8	8
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	0,552810	17,78	5,37	17,78	5,37	17,78	1	1
9	JASA-JASA	0,196841	5,37	18,37	5,37	18,37	5,37	4	4

Lampiran 17. Total Skalling Berdasarkan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	RESKALLING LQ	RESKALLING DLQ	TOTAL SKALLING	RESKALLING	RANGKING
1	PERTANIAN	100,00	5,37	105,37	105,37	2
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	18,22	18,37	36,59	36,59	6
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,00	9,78	9,78	9,78	9
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	23,65	18,61	42,25	42,25	4
5	BANGUNAN	20,43	0,00	20,43	20,43	7
6	PERDAGANGAN	30,67	7,81	38,48	38,48	5
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	10,63	4,90	15,53	15,53	8
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	76,43	100,00	176,43	176,43	1
9	JASA-JASA	34,42	17,78	52,20	52,20	3

Lampiran 18. Skalling Coefficient Resuffle (CR) Sektor Ekonomi Kabupaten Pematang Pemalang (dalam Angka)

NO	SEKTOR EKONOMI	CR	SKALLING	RESKALLING	RANGKING
1	PERTANIAN	-0,001561	0,00	0,00	9
2	PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN	0,000039	54,81	54,81	5
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,001359	100,00	100,00	1
4	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,000018	54,07	54,07	6
5	BANGUNAN	0,000000	53,47	53,47	7
6	PERDAGANGAN	0,000075	56,04	56,04	4
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,000076	56,08	56,08	3
8	KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN	-0,000022	52,71	52,71	8
9	JASA-JASA	0,000090	56,53	56,53	2